**KAJIAN KONSTITUSI SEBAGAI LANDASAN DASAR
TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMILU
DI INDONESIA**

Anwar Hidayat
Universitas Buana Perjuangan
E-mail: anwar.hidayat@ubpkarawang.ac.id

Masuk: September 2019	Penerimaan: Oktober 2019	Publikasi: Desember 2019
-----------------------	--------------------------	--------------------------

ABSTRAK

Mengenai sistem pemilu menjelaskan bahwa rekrutmen seorang kandidat oleh partai politik bergantung pada sistem pemilu yang berkembang di suatu negara. Daftar terbuka memungkinkan seorang kandidat mendapat Bagi partai politik, popularnya seorang caleg membuat pilihan pemilih terfokus kepada partainya ketimbang kepada partai-partai politik lain. Di Indonesia pula, undang-undang pemilu yang terakhir mensyaratkan setiap partai politik menyertakan minimal 30% kandidat perempuan. Hal ini membuka kemungkinan yang lebih besar bagi perempuan untuk menjadi legislator. Namun, di sisi lain partai politik sangat selektif terhadap caleg perempuan: Hanya caleg perempuan yang memenuhi kriteria tertentu (cantik, populer, akademik) yang benar-benar masuk ke dalam 30% kandidat partai mereka. Dalam penulisan ilmiah ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analisis. Lokasi penelitian di kampus Universitas Buana Perjuangan Karawang Adapun hasil penelitian membahas tentang Sistem Pemilu Tahun 1955 Sampai Sistem Pemilu Tahun 2019 dan cita-cita besar dari niatan menyelenggarakan Pemilu serentak di tahun 2019 salah satunya adalah untuk memperkuat Sistem Presidensial. Pemilu Serentak dapat menjadi salah satu upaya pembenahan sistem Presidensial yang dilaksanakan di Indonesia pasca reformasi.

Kata kunci: Konstitusi; Sistem Politik; Pemilu.

ABSTRACT

Regarding the electoral system explained that the recruitment of a candidate by a political party depends on the electoral system that develops in a country. An open list allows a candidate to get For political parties, the popularity of a candidate makes voter choices focused on his party rather than on other political parties. In Indonesia too, the latest election law requires each political party to include a minimum of 30% female candidates. This opens up greater possibilities for women to become legislators. However, on the other hand political parties are very selective towards women candidates: Only women candidates who meet certain criteria (beautiful, popular, academic) actually make up 30% of their party candidates. In scientific

writing, the writer uses the method of normative juridical approach, with research specifications namely descriptive analysis. Research locations on the Buana Perjuangan University campus Karawang The results of the study discussed the 1955 Election System to the 2019 Election System and the great ideals of the intention to hold simultaneous elections in 2019 one of which was to strengthen the Presidential System. Concurrent elections can be one of the efforts to reform the Presidential system implemented in Indonesia after the reform.

Keywords: *Constitution; Elections; Political System.*

I. PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu alat untuk menjalankan sebuah negara melalui kekuasaan.¹ Negara Indonesia sebagai negara hukum dan bukan berdasarkan pada kekuasaan belaka,² maka dalam menjalankan segala kehidupan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku demi terciptanya suatu ketertiban hukum dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan istilah Negara Indonesia sebagai Negara hukum (*Rechtsstaat*) yang berdasarkan pada Pancasila.³

Mengenai sistem pemilu menjelaskan bahwa rekrutmen seorang kandidat oleh partai politik bergantung pada sistem pemilu yang berkembang di suatu negara. Di Indonesia, pemilihan legislatif (DPR, DPRD I, dan DPRD II) menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka. Lewat sistem semacam ini, partai-partai politik cenderung mencari kandidat yang populer sehingga punya elektabilitas yang tinggi di mata para pemilih. Hal ini pula yang mendorong banyak artis (sinetron, lawak, penyanyi) yang tergiur untuk bergabung ke dalam sebuah partai politik.⁴ Selain arti, banyak partai politik merekrut academic-celebrity sebagai kandidat mereka. Daftar terbuka

¹ Dedi Mulyadi dan M. Rendi Aridhayandi, 2015, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Dihubungkan Dengan Pencegahan Korupsi Politik*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, hlm. 537.

² Hilman Nur, 2017, *Peluang dan Ancaman Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Bagi Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 3 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, hlm. 161-162.

³ Dedi Mulyadi, 2012, *Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di*

Indonesia dalam Perspektif Demokrasi, Gramata Publishing, Jakarta, hlm. 19.

⁴ Gaffar, Janedri M. 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Konpress Konstitusi, Jakarta, hlm. 31.

memungkinkan seorang kandidat mendapat Bagi partai politik, populernya seorang caleg membuat pilihan pemilih terfokus kepada partainya ketimbang kepada partai-partai politik lain. Di Indonesia pula, undang-undang pemilu yang terakhir mensyaratkan setiap partai politik menyertakan minimal 30% kandidat perempuan. Hal ini membuka kemungkinan yang lebih besar bagi perempuan untuk menjadi legislator.⁵

Namun, di sisi lain partai politik sangat selektif terhadap caleg perempuan: Hanya caleg perempuan yang memenuhi kriteria tertentu (cantik, populer, akademik) yang benar-benar masuk ke dalam 30% kandidat partai mereka. Tingkat persaingan antar caleg perempuan lebih besar ketimbang antar caleg laki-laki. Pemilihan umum merupakan mekanisme penting dalam sebuah negara, terutama yang menggunakan jenis sistem politik Demokrasi Liberal. Pemilihan Umum yang mendistribusikan perwakilan kepentingan elemen masyarakat

berbeda ke dalam bentuk representasi orang-orang partai di parlemen. Sebab itu, pemilihan sebuah sistem pemilihan umum perlu disepakati bersama antara partai-partai politik yang terdaftar (yang sudah duduk di parlemen) dengan pemerintah.

Indonesia telah menyelenggarakan 9 kali pemilihan umum. Khususnya untuk pemilihan anggota parlemen (baik pusat maupun daerah) digunakan jenis Proporsional, yang kadang berbeda dari satu pemilu ke pemilu lain. Perbedaan ini akibat sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti jumlah penduduk, jumlah partai politik, trend kepentingan partai saat itu, dan juga jenis sistem politik yang tengah berlangsung.

Sebelum dilakukan pembahasan atas sistem pemilu yang pernah diterapkan di Indonesia, ada baiknya dijelaskan jenis-jenis sistem pemilu yang banyak dipakai di dunia. Penjelasan hanya dititikberatkan pada kategori-kategori umum dari setiap jenis sistem pemilu. Secara garis besar, sistem Mayoritas/Pluralitas menghendaki kemenangan partai atau

⁵ Ismail Suny, 1978, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 9

calon legislatif yang memperoleh suara terbanyak. Calon legislatif atau partai dengan suara yang kalah otomatis tersingkir begitu saja. Varian dari sistem Mayoritas/Pluralitas adalah *First Past The Post*, *Two Round System*, *Alternative Vote*, *Block Vote*, dan *Party Block Vote*.

Sistem proporsional biasanya diminati di negara-negara dengan sistem kepartaian Plural ataupun multipartai (banyak partai). Meskipun kalah di suatu daerah pemilihan, calon legislatif ataupun partai politik dapat mengakumulasi suara dari daerah-daerah pemilihan lain, sehingga memenuhi kuota guna mendapatkan kursi. Varian sistem Proporsional adalah Proporsional Daftar dan *Single Transferable Vote*.

Sistem *Mixed* (campuran) merupakan pepaduan antara sistem Proporsional dengan Mayoritas/Pluralitas. Kedua sistem pemilu tersebut berjalan secara beriringan. Hal yang diambil adalah ciri-ciri positif dari masing-masing sistem. Varian dari sistem ini adalah *Mixed Member Proportional* dan *Parallel*.

Sistem *Other/Lainnya* adalah sistem-sistem pemilu yang tidak termasuk ke dalam 3 sistem sebelumnya. Varian dari sistem lainnya ini adalah *Single No Transferable Vote* (SNTV), *Limited Vote*, dan *Borda Count*.⁶

II. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ilmiah ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analisis. Lokasi penelitian di kampus Universitas Buana Perjuangan Karawang, gambaran pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan berbagai tahapan diantaranya:

1. Tahap I melakukan observasi sebelum melakukan penelitian
2. Tahap II melakukan wawancara dengan beberapa *stakeholder* di Kabupaten Karawang
3. Tahap III melakukan penelitian
4. Tahap IV Sosialisasi hasil penelitian

⁶ Hanan, Djayadi. 2011, *Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak Sistem Pemilu dan Sistem Kepartaian*. Sinar Grafika, Bandung, hlm. 12

III. PEMBAHASAN

1. SISTEM PEMILU TAHUN 1955.

Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama yang diadakan oleh Republik Indonesia. Pemilu ini merupakan reaksi atas Maklumat Nomor X/1945 tanggal 3 Nopember 1945 dari Wakil Presiden Moh. Hatta, yang menginstruksikan pendirian partai-partai politik di Indonesia. Pemilu pun – menurut Maklumat – harus diadakan secepat mungkin. Namun, akibat belum siapnya aturan perundangan dan logistik (juga kericuhan politik dalam negeri seperti pemberontakan), Pemilu tersebut baru diadakan tahun 1955 dari awalnya direncanakan Januari 1946. Landasan hukum Pemilu 1955 adalah Undang-undang Nomor 7 tahun 1953 yang diundangkan 4 April 1953. Dalam UU tersebut, Pemilu 1955 bertujuan memilih anggota bikameral: Anggota DPR dan Konstituante (seperti MPR). Sistem yang digunakan adalah *proporsional*. Menurut UU nomor 7 tahun 1953 tersebut, terdapat perbedaan sistem bilangan pembagi pemilih (BPP) untuk anggota konstituante dan anggota parlemen.

Perbedaan-perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:⁷

1. Jumlah anggota konstituante adalah hasil bagi antara total jumlah penduduk Indonesia dengan 150.000 dibulatkan ke atas;
2. Jumlah anggota konstituante di masing-masing daerah pemilihan adalah hasil bagi antara total penduduk WNI di masing-masing wilayah tersebut dengan 150.000; Jumlah anggota konstituante di masing-masing daerah pemilihan adalah bilangan bulat hasil pembagian tersebut; Jika kurang dari 6, dibulatkan menjadi 6; Sisa jumlah anggota konstituante dibagikan antara daerah-daerah pemilihan lainnya, seimbang dengan jumlah penduduk warganegara masing-masing;
3. Jika dengan cara poin ke dua di atas belum mencapai jumlah anggota konstituante seperti di poin ke satu, kekurangan anggota

⁷ Haris, Syamsuddin; Surbakti, Ramlan; Isra, Saldi; Bakti, Ikrar Nusa (dkk), 2014, *Pemilu Nasional Serentak 2009 (Position Paper)*. Electoral Institute LIPI, Jakarta, hlm. 16

dibagikan antara daerah-daerah pemilihan yang memperoleh jumlah anggota tersedikit, masing-masing 1, kecuali daerah pemilihan yang telah mendapat jaminan 6 kursi itu;

4. Penetapan jumlah anggota DPR seluruh Indonesia adalah total jumlah penduduk Indonesia dibagi 300.000 dan dibulatkan ke atas;
5. Jumlah anggota DPR di masing-masing daerah pemilihan adalah hasil bagi antara total penduduk WNI di masing-masing wilayah tersebut dengan 300.000; Jumlah anggota DPR di masing-masing daerah pemilihan adalah bilangan bulat hasil pembagian tersebut; Jika kurang dari 3, dibulatkan menjadi 3; Sisa jumlah anggota DPR dibagikan antara daerah-daerah pemilihan lainnya, seimbang dengan jumlah penduduk warganegara masing-masing;
6. Jika dengan cara poin ke lima di atas belum mencapai jumlah anggota DPR seperti di poin ke

empat, kekurangan anggota dibagikan antara daerah-daerah pemilihan memperoleh jumlah anggota tersedikit, masing-masing 1, kecuali daerah pemilihan yang telah mendapat jaminan 3 kursi itu.

2. SISTEM PEMILU TAHUN 1971.

Pemilu 1971 diadakan tanggal 5 Juli 1971. Pemilu ini dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang *Pemilu* dan Undang-undang Nomor 16 tentang *Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD*. Pemilu ditujukan memilih 460 anggota DPR dimana 360 dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat sementara 100 orang diangkat dari kalangan angkatan bersenjata dan golongan fungsional oleh Presiden. Untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD digunakan *sistem perwakilan berimbang* (proporsional) dengan *stelsel daftar*. Pemilu diadakan di 26 provinsi Indonesia. Rakyat memilih mencoblos tanda gambar partai. Untuk memilih anggota DPR daerah

pemilihannya adalah Daerah Tingkat I (provinsi) dan sekurang-kurangnya 400.000 penduduk memiliki satu orang wakil dengan memperhatikan bahwa setiap provinsi minimal memiliki wakil minimal sejumlah daerah tingkat II (kabupaten/kota) di wilayahnya. Setiap daerah tingkat II minimal punya satu orang wakil.⁸

Pemilu 1971 ini diikuti 9 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu:

1. Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)
2. Partai Nahdlatul Ulama (PNU)
3. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
4. Partai Islam PERTI
5. Partai Nasional Indonesia (PNI)
6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
7. Partai Katolik
8. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)
9. Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba)
10. Golongan Karya (Golkar)

Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah

Golongan Karya. Dalam Pemilu 1971, total pemilih terdaftar adalah 58.179.245 orang dengan suara sah mencapai 54.699.509 atau 94% total suara. Dari total 460 orang anggota parlemen yang diangkat presiden, 75 orang berasal dari angkatan bersenjata sementara 25 dari golongan fungsional seperti tani, nelayan, agama, dan sejenisnya. Dari ke-25 anggota golongan fungsional kemudian bergabung dengan Sekber Golkar sehingga kursi Golkar meroket hingga ke angka 257 (dari 232 ditambah 25). Dari 460 orang anggota parlemen, jumlah anggota berjenis kelamin laki-laki 426 dan perempuan 34 orang.

3. SISTEM PEMILU TAHUN 1977.

Dasar hukum Pemilu 1977 adalah Undang-undang No. 4 Tahun 1975. Pemilu ini diadakan setelah fusi partai politik dilakukan pada tahun 1973. Sistem yang digunakan pada pemilu 1977 serupa dengan pada pemilu 1971 yaitu *sistem proporsional dengan daftar tertutup*. Pemilu 1977 diadakan secara serentak tanggal 2 Mei 1977. Pemilu 1977 ditujukan guna memiliki

⁸ *Ibid*, hlm 17

parlemen *unicameral* yaitu DPR di mana 360 orang dipilih lewat pemilu ini sementara 100 orang lainnya diangkat oleh Presiden Suharto. Persyaratan untuk ikut serta sebagai pemilih adalah berusia sekurangnyanya 17 tahun atau pernah menikah, kecuali mereka yang menderita kegilaan, eks PKI ataupun organisasi yang berkorelasi dengannya, juga narapidana yang terkena pidana kurung minimal 5 tahun tidak diperbolehkan ikut serta. Sementara itu, kandidat yang boleh mencalonkan diri sekurang berusia 21 tahun, lancar berbahasa Indonesia, mampu baca-tulis latin, sekurangnyanya lulusan SMA atau sederajat, serta loyal kepada Pancasila sebagai ideologi negara. *Voting* dilakukan di 26 provinsi dengan *sistem proporsional daftar partai (party list system)*.

4. SISTEM PEMILU TAHUN 1982.

Pemilu 1982 diadakan tanggal 4 Mei 1982. Tujuannya sama seperti Pemilu 1977 di mana hendak memilih anggota DPR (parlemen). Hanya saja, komposisinya sedikit berbeda. Sebanyak 364 anggota dipilih langsung

oleh rakyat, sementara 96 orang diangkat oleh presiden. Pemilu ini dilakukan berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 1980.

Pemilu 1982 ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu:⁹

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2. Golongan Karya (Golkar)
3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya. *Voting* dilakukan di 27 daerah pemilihan berdasarkan *sistem Proporsional dengan Daftar Partai* (Party-List System). Partai yang beroleh kursi berdasarkan pembagian total suara yang didapat di masing-masing wilayah pemilihan dibagi *electoral quotient* di masing-masing wilayah. Jumlah total pemilih terdaftar adalah 82.132.263 orang dengan jumlah suara sah mencapai 74.930.875 atau 91,23%. Golkar beroleh 48.334.724 suara (58,44%) sehingga berhak untuk mendapat 246

⁹ Prihatmoko, Joko J. 2008, *Mendemokratiskan Pemilu dari Sistem Sampai Elemen Praktis*. Pusat Belajar, Yogyakarta, hlm. 8.

kursi parlemen. PPP beroleh 20.871.880 suara (25,54%) sehingga berhak untuk mendapat 94 kursi parlemen. PDI beroleh 5.919.702 suara (7,24%) sehingga berhak mendapat 24 kursi parlemen. Anggota DPR yang diangkat Presiden Suharto berasal dari ABRI sejumlah 75 orang dan golongan fungsional sebanyak 21 orang. Golongan fungsional lalu bergabung dengan Golkar sehingga kursi parlemen Golkar naik menjadi 267 kursi. Dari 360 anggota parlemen, yang berjenis kelamin laki-laki sejumlah 422 dan perempuan 38 orang.

5. SISTEM PEMILU TAHUN 2004.

Pemilu 2004 merupakan sejarah tersendiri bagi pemerintah dan rakyat Indonesia. Di pemilu 2004 ini, untuk pertama kali rakyat Indonesia memilih presidennya secara langsung. Pemilu 2004 sekaligus membuktikan upaya serius mewujudkan sistem pemerintahan Presidensial yang dianut oleh pemerintah Indonesia. Pemilu 2004 menggunakan sistem pemilu yang berbeda-beda, bergantung untuk memilih siapa. Dalam pemilu 2004,

rakyat Indonesia memilih presiden, anggota parlemen (DPR, DPRD I, dan DPRD II), serta DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Untuk ketiga maksud pemilihan tersebut, terdapat tiga sistem pemilihan yang berbeda.

Sistem pemilu yang digunakan adalah *Proporsional dengan Daftar Calon Terbuka*. Proporsional Daftar adalah sistem pemilihan mengikuti jatah kursi di tiap daerah pemilihan. Jadi, suara yang diperoleh partai-partai politik di tiap daerah selaras dengan kursi yang mereka peroleh di parlemen. Untuk memilih anggota parlemen, digunakan *sistem pemilu Proporsional dengan varian Proporsional Daftar* (terbuka). Untuk memilih anggota DPD, digunakan sistem pemilu Lainnya, yaitu *Single Non Transverable Vote* (SNTV). Sementara untuk memilih presiden, digunakan sistem pemilihan Mayoritas/Pluralitas dengan *varian Two Round System* (Sistem Dua Putaran) *Pemilihan Legislatif*. Mekanisme pengaturan pemilihan anggota parlemen ini ada di dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2003. Untuk kursi DPR, dijatahkan 550 kursi. Daerah

pemilihan anggota DPR adalah provinsi atau bagian-bagian provinsi. Untuk kursi di DPRD I berlaku ketentuan berikut: (1) daerah pemilihan DPRD I adalah kabupaten atau kota atau gabungan kabupaten/kota; (2) provinsi berpenduduk sampai dengan 1 juta mendapat 35 kursi; (3) provinsi berpenduduk > 1 juta sampai dengan 3 juta, beroleh 45 kursi; (4) provinsi berpenduduk > 3 juta sampai dengan 5 juta, beroleh 55 kursi; (5) provinsi berpenduduk > 5 juta sampai dengan 7 juta, beroleh 65 kursi; (6) provinsi berpenduduk > 7 juta sampai dengan 9 juta, beroleh 75 kursi; (7) provinsi berpenduduk > 9 juta sampai dengan 12 juta, beroleh 85 kursi; dan (8) provinsi berpenduduk > 12 juta beroleh 100 kursi.

6. SISTEM PEMILU TAHUN 2009.

Pemilu 2009 dilaksanakan menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 2008. Jumlah kursi DPR ditetapkan sebesar 560 di mana daerah dapil anggota DPR adalah provinsi atau bagian provinsi. Jumlah kursi di tiap dapil yang diperebutkan minimal tiga

dan maksimal sepuluh kursi. Ketentuan ini berbeda dengan Pemilu 2004.¹⁰

Parpol Peserta Pemilu 2009, 44
Partai Politik

1. Pemilihan Legislatif.

Menurut Pasal 23 Undang-undang Nomor 10 tahun 2008, jumlah kursi untuk anggota DPRD Provinsi minimal tiga puluh lima dan maksimal seratus kursi. Jumlah ini ditentukan melalui perhitungan jumlah penduduk wilayah provinsi masing-masing dimana: (1) provinsi berpenduduk minimal 1.000.000 mendapat alokasi 35 kursi; (2) provinsi berpenduduk 1.000.000–3.000.000 mendapat alokasi 45 kursi; (3) provinsi berpenduduk 3.000.000–5.000.000 mendapat alokasi 55 kursi; (4) provinsi berpenduduk 5.000.000–7.000.000 mendapat alokasi 65 kursi; (5) provinsi berpenduduk 7.000.000–9.000.000 mendapat alokasi 75 kursi; (6) provinsi berpenduduk 9.000.000–11.000.000 mendapat alokasi 85 kursi; dan (7) provinsi berpenduduk di atas 11.000.000

¹⁰ Media Kompas Online pada 23 Januari 2014 dalam <http://nasional.kompas.com/read/2014/01/23/1536382/Ini.Alasan.MK.Putuskan.Pemilu.Serentak.2019>

mendapat alokasi 100 kursi. Selanjutnya pasal 24 undang-undang ini menyebutkan bahwa daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi adalah kabupaten atau kota atau gabungan kabupaten atau kota di mana jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sama dengan pemilu 2004.

Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten atau kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan yang jumlahnya sama seperti pemilu 2004. Jumlah kursi DPRD kabupaten atau kota paling sedikit 20 dan paling banyak 50 kursi, yang besaran kursinya ditentukan oleh: (1) wilayah berpenduduk hingga 100.000 mendapat alokasi 20 kursi; (2) wilayah berpenduduk 100.000–200.000 mendapat alokasi 25 kursi; (3) wilayah berpenduduk 200.000–300.000 mendapat alokasi 30 kursi; (4) wilayah berpenduduk 300.000–400.000 mendapat alokasi 35 kursi; (5) wilayah berpenduduk 400.000–500.000 mendapat alokasi 40 kursi; (6) wilayah berpenduduk 500.000–1.000.000 mendapat alokasi 45 kursi; (7) wilayah

berpenduduk > 1.000.000 mendapat alokasi 50 kursi.

2. *Pemilihan DPD.*

Untuk pemilihan anggota DPD ditetapkan 4 kursi bagi setiap provinsi. Provinsi adalah daerah pemilihan untuk anggota DPD. Dan dengan demikian dengan total provinsi sejumlah 33, jumlah anggota DPD Indonesia adalah 132 orang. Sistem pemilihan untuk anggota DPD menggunakan *Single Non Transferable Vote* (SNTV). Pemilu 2009 masih menggunakan sistem yang mirip dengan Pemilu 2004. Namun, electoral threshold dinaikkan menjadi 2,5%. Artinya, partai-partai politik tatkala masuk ke perhitungan kursi caleg hanya dibatasi bagi yang berhasil mengumpulkan komposisi suara di atas 2,5%. Pemilu ini pun mirip dengan Pemilu 1999 di mana 48 partai ikut berlaga dalam kompetisi dagang janji ini.

3. *Pemilihan Presiden.*

Pemilu Presiden tahun 2009 menggunakan *Two Round System*. Artinya, jika pada putaran pertama tidak terdapat pasangan yang menang 50 plus 1 atau merata persebaran suara

di lebih dari setengah daerah pemilihan maka konsekuensinya harus diadakan putaran kedua. Untungnya, dana negara tidak terbuang sia-sia karena pemilu Presiden 2009 ini cuma berlangsung satu putaran saja. Pilpres yang direkapitulasi oleh KPU pada 22 – 4 Juli 2009 ini diikuti oleh tiga pasang calon yaitu : (1) Megawati–Prabowo *aka* MegaPro; (2) SBY–Boediono *aka* SBY Berbudi; dan (3) Jusuf Kalla–Wiranto *aka* JK Win. Hasil Pilpres resmi KPU menghasilkan data berikut:

1. Megawati–Prabowo (32.548.105 atau 26,79%)
2. SBY–Boediono (73.874.562 atau 60,80%)
3. JK–Wiranto (15.081.814 atau 12,41%)
4. Dengan demikian, pasangan SBY–Boediono keluar sebagai pemenang Pemilihan Presiden tahun 2009 dan sah untuk mengatur administrasi negara kesatuan Republik Indonesia dari 2009 hingga 2014.

7. SISTEM PEMILU TAHUN 2014.

Pemilu 2014 akan dilaksanakan menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 2012. Untuk pemilu anggota Legislatif akan diadakan pada tanggal 9 April 2014. Jumlah kursi DPR ditetapkan sebesar 560 di mana daerah dapil anggota DPR adalah provinsi atau bagian provinsi. Jumlah kursi di tiap dapil yang diperebutkan minimal tiga dan maksimal sepuluh kursi. Adapun partai politik peserta pemilu 2014 sebanyak 15 parpol menurut keputusan KPU pusat, terdiri dari 12 parpol nasional dan 3 parpol lokal di Aceh.¹¹

8. SISTEM PEMILU TAHUN 2019.

Esensi demokrasi secara substansial dan kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilu serentak di 2019 pada akhirnya menjadi cita-cita setiap sistem Pemerintahan dimanapun sebuah negara menerapkannya. Melihat kepada substansi demokrasi terkait keterwakilan rakyat, Pemilu Serentak yang membuka ruang kepada

¹¹ Media Republika Online pada 24 Januari 2014 dalam laman <http://www.republika.co.id/berita/pemilu/berita-pemilu/14/01/24/mzwial-ini-dampak-negatif-pemilu-serentak>

pemilih untuk menentukan wakil rakyatnya bersamaan dengan presidennya, sesungguhnya akan membuka ruang kebebasan yang lebih. Namun demikian, penolakan terhadap sistem pemilu serentak ini juga dikemukakan beberapa tokoh ditanah air. Prof. Maswadi Rauf, Pakar Ilmu Politik dari Universitas Indonesia misalnya, beranggapan bahwa pelaksanaan Pemilu Serentak di 2019 akan menimbulkan ketegangan dan keramaian dimana rakyat menjadi bingung dalam memilih calon anggota legislatif dan calon presiden yang menurutnya terbaik dikarenakan Caleg yang banyak harus dipilih, juga Capres itu sendiri. Hal ini juga berpotensi untuk munculnya lebih banyak partai politik, karena ambisi dari segelintir orang yang ingin menjadi pemimpin dinegeri ini.¹²

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan

Cita-cita besar dari niatan menyelenggarakan Pemilu serentak di tahun 2019 salah satunya adalah untuk

memperkuat Sistem Presidensial. Pasca reformasi, dengan serangkaian amandemen UUD 1945, konstitusi negara tersebut menghilangkan kekuasaan MPR sebagai mendataris Presiden, dimana Presiden tidak lagi bertanggungjawab kepada MPR, melainkan kepada rakyat langsung. Sederhananya, rakyat yang paling berhak menilai, layak atau tidaknya seorang Presiden kembali memimpin dengan syarat sebanyak-banyaknya dua periode. Rakyat pun menginginkan untuk memilih wakil-wakilnya bersamaan dengan memilih pemimpinnya, dan hal ini direalisasikan melalui pemilu serentak 2019. Bagi para pendukung dilaksanakannya Pemilu serentak, keuntungan yang didapat dari penyelenggaraan pemilihan wakil rakyat dan presiden yang diselenggarakan secara bersamaan ini antara lain menekan biaya penyelenggaraan Pemilu yang tidak tanggung-tanggung mencapai puluhan triliun. Selain itu Pemilu serentak juga dapat meminimalisir politik yang berbiaya tinggi, seperti pada pelaksanaan kampanye sampai

¹² Media Liputan6 online pada 24 Januari 2014 dalam laman <http://news.liputan6.com/read/808211/untung-rugi-pemilu-serentak-2019>

kepada politik uang. Pemilu serentak juga secara langsung dapat menghindari penyalahgunaan kekuasaan para pejabat dalam masa tugas atau yang disebut politisasi birokrasi, adalah upaya untuk menghindari korupsi, menjaga stabilitas bangsa serta mengefektifkan kerja Pemerintahan. Sementara hasil dari penelitian ini, Pemilu Serentak dapat menjadi salah satu upaya pembenahan sistem Presidensial yang dilaksanakan di Indonesia pasca reformasi.

2. Saran

Maka dalam hal ini ada beberapa saran yang disampaikan pada makalah ini adalah :

a. Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan kehidupan politik Indonesia semakin kompleks. Diharapkan dengan semakin banyaknya pengalaman dan perkembangan politik Indonesia dapat menciptakan stabilitas nasional. Tugas pembangunan kehidupan politik pada masa yang akan datang bukan hanya tugas partai politik

saja, tetapi semua elemen pemerintahan dan tidak ketinggalan masyarakat juga harus ikut berpartisipasi mengembangkan perpolitikan di Indonesia.

- b. Bagi pemerintah, hendaknya merumuskan kebijakan mengenai Pemilu dengan sebaik- baiknya, menyeleksi jumlah partai dengan ketat, dan melakukan sosialisasi politik secara maksimal kepada masyarakat dan sebaiknya pemerintah membuat pembenahan misalnya pendidikan dan pemberian informasi yang lengkap terhadap masyarakat sebagai pemilih.
- c. Bagi partai politik, hendaknya memaksimalkan fungsi-fungsi partai yang berkaitan dengan komunikasi, partisipasi, dan sosialisasi untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat dan tidak melakukan praktek money politic.
- d. Bagi masyarakat, supaya tidak mau menerima praktek money politic yang dilakukan oleh partai

- politik, agar tidak menyesal untuk kedepannya dan tidak golput dalam pemilihan dan juga harus peka terhadap partai politik.
- e. Bagi praja, seharusnya praja lebih peduli terhadap informasi terkait dengan perkembangan perpolitikan di Indonesia untuk meningkatkan pandangan dan pemikiran aktual mengenai kondisi bangsa sehingga dapat menularkan ilmu yang didapat kepada orang-orang yang disekitarnya yang belum mengerti tentang pemilu.
- Geys, Benny. 2013, *"Explaining Voter Turnout: A Review of Aggregate – level Research."* Dalam Electoral Studies 25.
- Hanan, Djayadi. 2016. *Memperkuat Presiensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak Sistem Pemilu dan Sistem Kepartaian.*
- Haris, Syamsuddin; Surbakti, Ramlan; Isra, Saldi; Bakti, Ikrar Nusa (dkk). 2014. *Pemilu Nasional Serentak 2009 (Position Paper).* Jakarta: Electoral Institute LIPI.
- Maksudi, Beddy Iriawan. 2013. *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoretik dan Empirik,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prihatmoko, Joko J. 2012. *Mendemokratiskan Pemilu dari Sistem Sampai Elemen Praktis.* Yogyakarta: Pusat Belajar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dedi Mulyadi, 2012, *Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia dalam Perspektif Demokrasi,* Gramata Publishing, Jakarta.
- Elvi. 2013. *Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi,* Bandung: Mandar Maju.
- Gaffar, 2012, Janedri M. *Politik Hukum Pemilu, Jakarta: Konpress Konstitusi.*
- Sukarna, 2011, Sistem Politik, Bandung: Alumni.
- The Political System, New York: Alfred A. Knopf, Inc. Easton, David. (1982). Analisa Sistem Politik, Dalam Mochtar Mas'ood dan Colin Mac Andrew (Ed). 2009. Perbandingan Sistem Politik, Gajah Mada University Press. Juliansyah.
- Winarno. 2015. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi, Jakarta: Bumi Aksara.

B. Jurnal, Internet.

Dedi Mulyadi dan M. Rendi
Aridhayandi, 2015, *Putusan
Mahkamah Konstitusi Tentang
Pemilu Serentak Dihubungkan
Dengan Pencegahan Korupsi Politik*,
Jurnal Hukum Mimbar Justitia,
Fakultas Hukum Universitas
Suryakencana, Cianjur.

Hilman Nur, 2017, *Peluang dan
Ancaman Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA) Bagi Perkembangan
Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*,
Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 3
No. 2, Fakultas Hukum Universitas
Suryakencana, Cianjur.

Media Kompas Online pada 23 Januari
2014 dalam laman
[http://nasional.kompas.com/read/
/2014/01/23/1536382/Ini.Alasan.
MK.Putuskan.Pemilu.Serentak.20
19](http://nasional.kompas.com/read/2014/01/23/1536382/Ini.Alasan.MK.Putuskan.Pemilu.Serentak.2019).

Media Liputan6 online pada 24 Januari
2014 dalam laman
[http://news.liputan6.com/read/8
08211/untung-rugi-pemilu-
serentak-2019](http://news.liputan6.com/read/808211/untung-rugi-pemilu-serentak-2019)

Media Republika Online pada 24
Januari 2014 dalam laman
[http://www.republika.co.id/berit
a/pemilu/berita-
pemilu/14/01/24/mzwial-ini-
dampak-negatif-pemilu-serentak](http://www.republika.co.id/berita/pemilu/berita-pemilu/14/01/24/mzwial-ini-dampak-negatif-pemilu-serentak).